

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Siantar merupakan salah satu daerah yang terdapat di wilayah Simalungun. Pada dahulunya Siantar merupakan salah satu kerajaan di Simalungun yang dipimpin oleh dinasti bermarga Damanik. Istilah Siantar sendiri berasal dari bahasa simalungun yang bermakna “terletak diantara “ yaitu dua perairan luas yakni “ laut daur (Danau Toba) di sebelah selatan dan Selat Malaka di sebelah Timur. (Damanik Erond,2020:32)

Dalam catatan Anderson tahun 1823 nama Siantar dicatat dengan “ Seantar”. Sebelum tahun 1885, adapun wilayah Siantar meliputi teritorial dari perbatasan Danau Toba di Selatan hingga Selat Malaka. Teritori ini dikenal dengan nama “ Kerajaan Siantar “. Pemimpin tertinggi yaitu Raja Siantar tinggal di Rumah Bolon (Istana) yang terletak di Kampung Holang di Pematang Siantar.(Damanik Erond,2020:33)

Daerah Siantar sendiri sebelum tahun 1823 umumnya hanya dihuni oleh suku asli setempat yaitu suku Simalungun. Namun setelah kedatangan para penjajah bangsa Barat ke Simalungun di tahun 1889, daerah Simalungun sudah mulai dihuni oleh beranekaragam suku bangsa seperti suku bangsa Batak Toba , Jawa, Karo, Melayu , China dan India .

Sejarah kerajaan di Simalungun dimulai pada awal kedatangan Marga Damanik yang konon berasal dari India Selatan. Lalu pada abad ke 4M , Damanik mendirikan sebuah kerajaan yaitu kerajaan Nagur (Nagore). Kerajaan Nagur sendiri merupakan salah satu kerajaan tertua yang terdapat di Sumatera Timur. Wilayah Kerajaan Nagur ini sebagian besar terdiri dari daerah Timur Sumatera Utara. Setelah kerajaan Nagur runtuh maka timbullah kerajaan Siantar sebagai penerus kerajaan ini.

Kerajaan Siantar merupakan penerus Kerajaan Nagur, yakni rajanya bermarga Damanik. Pendiri kerajaan Siantar adalah Tuan Parmata Manunggal. Tuan Parmata Manunggal merupakan anak tunggal dari Raja Nagur yang terakhir yakni Marahsilu. Kerajaan Siantar tidak berdiri sendiri. Kerajaan ini memiliki sub kerajaan yang dibentuk secara konfederasi yang masing-masing memiliki hubungan kekerabatan. Konfederasi tersebut ialah Siantar, Sidamanik, Bandar dan Sipolha. Wilayah ini dikenal juga dengan sebutan *partuanon*. (Purba Juandaha & Damanik Erond, 2011:25)

Di Simalungun Marga Damanik merupakan marga pertama sekaligus marga resmi yang ada di Simalungun yang dapat memerintah di daerah Siantar. Lalu ada Marga Purba, Saragih dan Sinaga yang masing-masing menjadi marga asli yang boleh memerintah di daerah Simalungun. Keempat marga ini mendeklarasikan dirinya bahwa hanya ada 4 marga yang berhak memerintah dan memiliki wilayah berupa kerajaan di Simalungun.

Marga Damanik memerintah di daerah Siantar, Marga Purba memerintah di daerah Purba, Marga Saragih memerintah di daerah Raya dan

Marga Sinaga memerintah di daerah Tanah Jawa. Keempat marga ini eksis membuat Harajaon naopat (kerajaan yang empat) lalu diikuti Harajaon na pitu (Kerajaan yang Tujuh) hingga berakhir pada masa awal kemerdekaan Indonesia bertepatan dengan terjadinya Revolusi sosial di kawasan Sumatra Timur 1946.

Tahun 1865 kolonialisme Belanda mulai memasuki wilayah Simalungun. Sejak intervensi Pemetintahan kolonial banyak terjadi perubahan-perubahan yang signifikan di Simalungun. Memasuki tahun 1888 pemerintah kolonial mulai campur tangan terhadap wilayah Simalungun hingga raja-raja Simalungun takluk kepada Belanda dan dilanjutkan dengan penandatanganan *Korte Verklaring* atau Plakat Pendek. (Juandaha Purba & Damanik Erond, 2011: 57)

Pada tanggal 16 Oktober 1907, dua petinggi Kerajaan Siantar yakni Tuan Marihat (Tuan Torialam Damanik) dan Tuan Sidamanik (Tuan Riahta Damanik) menandatangani *Korte Verklaring* tersebut. Saat itu Kerajaan Siantar dipimpin oleh Tuan Sang Na Ualuh Damanik yang telah ditangkap Belanda akibat tidak tunduk pada Belanda.

Kemerdekaan Indonesia diperoleh dengan perjuangan yang tidak mudah. Perjuangan tersebut lebih dikenal dengan sebutan Revolusi Nasional Indonesia. Revolusi Nasional dilakukan rakyat Indonesia untuk melawan Belanda dan Sekutu yang kembali berupaya menjajah Indonesia setelah kekalahan Jepang dalam perang Asia Timur Raya tahun 1945. Namun, ditengah-tengah revolusi nasional melawan Belanda dan Sekutu, terjadi juga

revolusi sosial yang dilakukan rakyat Indonesia dengan menjadikan bangsawan pribumi yang dianggap “kaki-tangan” Jepang dan Belanda sebagai musuh. Dengan kata lain, revolusi sosial bisa disebut sebagai perang saudara sesama bangsa Indonesia.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, banyak kerajaan-kerajaan yang memiliki kekuasaan otonom di daerah meragukan kekuatan Republik Indonesia. Mereka khawatir pemerintah Republik Indonesia tidak cukup kuat untuk mempertahankan kemerdekaannya jika Belanda dan sekutu datang kembali ke Indonesia. Sikap raja-raja ini diartikan oleh para pemuda sebagai sikap keberpihakan terhadap Belanda dan Sekutu.

Hal ini menimbulkan keinginan para pemuda untuk melakukan penurunan secara paksa atau bahkan pembantaian terhadap raja-raja dan bekas pejabat yang bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Para pemuda yang tidak mau berkolaborasi dengan Jepang dan Belanda, tetap mempertahankan dan memupuk rasa tanggung jawab dari sebagian pergerakan kebangsaan yang antifasis, antifeodal dan yang mendambakan demokrasi.

Revolusi sosial dilancarkan dengan tindakan-tindakan brutal yang dilakukan sekelompok pemuda yang tergabung dalam kesatuan laskar atau organisasi tertentu. Selain itu, tindakan tersebut banyak menelan korban nyawa. Kebencian sekelompok pemuda terhadap sebagian raja telah menutupi rasa kemanusiaannya dengan melakukan tindakan-tindakan pembunuhan.

Berbicara tentang Revolusi Sosial di Siantar Simalungun berarti berbicara mengenai tragedi kemanusiaan yang terjadi di Siantar Simalungun 3 Maret

1946. Di Simalungun dan Siantar eksekutor dari Revolusi Sosial itu adalah Komandan Laskar Barisan Harimau Liar (BHL) A.E. Saragih Ras yang masih kerabat dari Kerajaan Panei Purba. BHL ini sendiri telah mendapat restu dari Komite Nasional Pusat Volksfront dalam menjalankan aksinya.(Juandaha Purba & Damanik Erond, 2011:143)

Revolusi Sosial yang terjadi disebabkan oleh adanya sentimen anti feodal yang dibuat oleh laskar-laskar pejuang dan organisasi berbasis nasionalisme Indonesia. Volksfront merupakan orrganisasi Persatuan Perjuangan yang terdiri dari Laskar BHL, PKI, PNI dan Pesindo.

Saragih Ras mendapatkan perintah dari M. Saleh Umar (Ka Staff BHL). Raja-raja Simalungun yang dianggap penghalang kemerdekaan yang harus dihabisi ialah Raja Panei Tuan Bosar Sumalam Purba Dasuha, Raja Raya Tuan Jan Kaduk Saragih Garingging, Raja Siantar Tuan Sawadim Damanik dan Raja Tanah Jawa Tuan Madjadi Sinaga dan lainnya.(Juandaha Purba & Damanik Erond, 2011:143)

Keberpihakan kerajaan Kerajaan Simalungun pada zaman kolonial Belanda & Jepang serta tidak jelasnya respon atau sikap para elite bangsawan terhadap berita kemerdekaan Indonesia menjadi api bagi peristiwa revolusi tersebut. Berita yang tersebar kalau pihak Kerajaan Simalungun selalu bekerjasama kepada kolonial serta berita menyambut kedatangan sekutu yang akan mendarat di Medan telah memicu ujaran kebencian rakyat yang ditujukan ke pihak Kerajaan Simalungun.

Revolusi Sosial yang terjadi sebenarnya lebih ke peristiwa pembantaian yang menindas para bangsawan Simalungun dan pengikutnya. Para bangsawan Simalungun beserta pengikutnya dan sanak saudaranya banyak yang dibunuh dan dilecehkan secara tidak manusiawi. Selain pembunuhan, penghinaan dan penghancuran terhadap Rumah Bolon (Istana) pun dilakukan. Banyak Istana di Simalungun yang habis dijarah dan dibakar oleh massa. Dari 7 istana hanya 1 yang masih tersisa yaitu Istana Kerajaan Purba di Pematang Purba.

Revolusi sosial 3 Maret 1946 berupa penghapusan swapraja secara brutal di Simalungun umumnya dinilai oleh para cendekiawan dan pengamat sosial sebagai suatu kejahatan yang tidak berprikemanusiaan serta tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia. Selain itu revolusi sosial ini juga dipandang merusak nilai-nilai historis dan budaya dari kerajaan-kerajaan yang ada di Simalungun pada saat itu. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul :“ Revolusi Sosial di Kerajaan Siantar Tahun 1946”.

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk membuat penelitian ini lebih terarah dan jelas, maka perlu diidentifikasi masalah yang ada. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sejarah terbentuknya Kerajaan Siantar

2. Latar Belakang terjadinya Peristiwa Revolusi Sosial di Kerajaan Siantar Tahun 1946
3. Proses berlangsungnya Peristiwa Revolusi Sosial di Kerajaan Siantar Tahun 1946
4. Pelaku-pelaku yang terlibat dalam peristiwa Revolusi Sosial di Kerajaan Siantar Tahun 1946
5. Dampak Positif dan Negatif yang dirasakan Masyarakat Siantar akibat Peristiwa Revolusi Sosial di Siantar Tahun 1946

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka saya selaku penulis membuat batasan masalah meliputi pembahasan kajian **“Revolusi Sosial di Kerajaan Siantar Tahun 1946”**

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang terjadinya Revolusi Sosial di Kerajaan Siantar Tahun 1946
2. Bagaimana proses berlangsungnya Revolusi Sosial di Kerajaan Siantar Tahun 1946
3. Siapa pelaku-pelaku yang terlibat dalam peristiwa Revolusi Sosial di Kerajaan Siantar Tahun 1946
4. Bagaimana dampak Peristiwa Revolusi Sosial di Kerajaan Siantar Tahun 1946

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun yang tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menjelaskan latar belakang terjadinya Revolusi Sosial di Kerajaan Siantar Tahun 1946.
2. Untuk menjelaskan proses berlangsungnya Revolusi Sosial di Kerajaan Siantar Tahun 1946.
3. Untuk menjelaskan pelaku-pelaku yang terlibat dalam Peristiwa Revolusi Sosial di Kerajaan Siantar Tahun 1946.
4. Untuk mengetahui dampak dari Revolusi Sosial di Kerajaan Siantar Tahun 1946.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dan pembaca mengenai Peristiwa Revolusi Sosial di Kerajaan Siantar Tahun 1946.
2. Dapat dijadikan sebagai referensi dalam sebuah tulisan ilmiah selanjutnya.
3. Untuk menambah wawasan kepada peneliti tentang penulisan karya Ilmiah.
4. Untuk memperkaya literatur tentang etnis , sosial dan budaya Simalungun.
5. Untuk menambah bahan bacaan dan resume mahasiswa.